



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2022**

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN  
PARIWISATA KOTA DUMAI  
JL. HR. SOEBRANTAS No. 135**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya telah selesai disusun Rencana kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2022 yang berisi tentang Laporan Kinerja kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2022.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata telah menyusun Laporan LKj-IP Tahun 2022 bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dijabarkan dan disusun pada setiap tahunnya. Laporan LKj-IP ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai tahun 2022

Demikian Laporan LKj-IP akhir tahun 2022 ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dumai, Januari 2023  
Kepala  
  
**R. DONA FITRI ILLAHI, S.KM, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731031 199212 2 001

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk menjadikan Kota Dumai sebagai Kota Wisata dan Berbudaya, terwujudnya Pemuda dan Insan Olahraga yang Sehat, Berprestasi, perlu upaya-upaya pengembangan terhadap potensi kepemudaan, olahraga dan tujuan wisata sehingga daya tarik wisata Kota Dumai dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui penyelenggaraan program-program Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai.

Untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai daerah berwisata, melestarikan pariwisata dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri serta berprestasi yang berwawasan lingkungan perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah menyusun suatu rencana strategis bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tata cara penyusunan pelaporan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022 merupakan suatu media pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Dumai pada tahun 2022

## **2. Maksud dan tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan dipemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LKj ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel .

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di sektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

### **3. Isu Strategis**

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dikota Dumai yaitu :

1. Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;
2. Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti Pelatihan;
3. Masih tingginya penggunaan narkoba dikalangan pemuda
4. Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda
5. Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya
6. Rendah pembinaan manajemen OKP
7. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan rendahnya kualitas atlit;
8. Pembinaan olahraga belum optimal
9. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
10. Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata
11. Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan

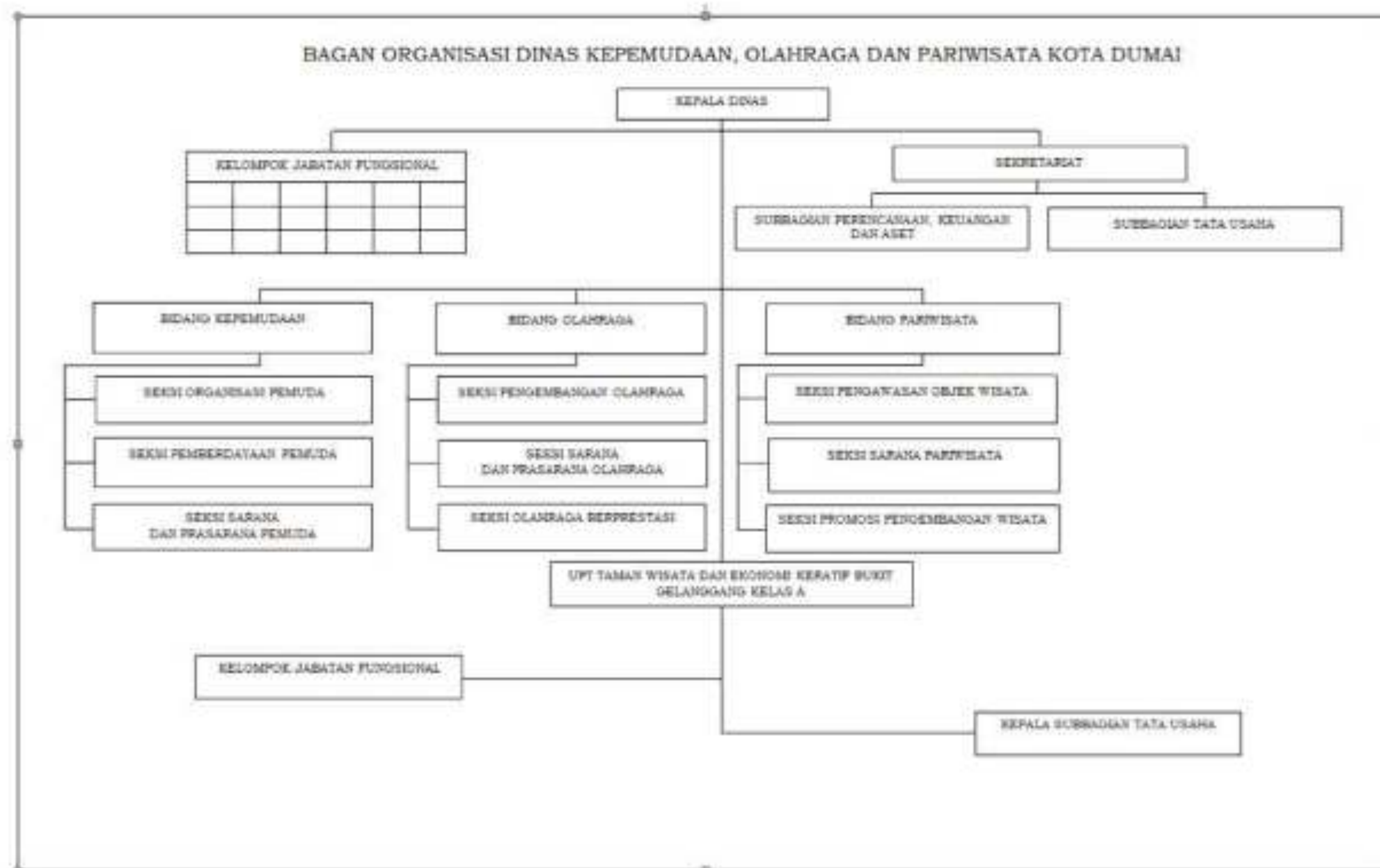
12. Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
13. Tata Kelola Destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana
14. Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan
15. Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai
16. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, objek dan daya tarik wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata

#### **4. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
  - b. Subbagian Tata Usaha
3. Bidang Kepemudaan
  - a. Seksi Organisasi Pemuda
  - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
4. Bidang Olahraga
  - a. Seksi Pengembangan Olahraga
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
  - c. Seksi Organisasi Berprestasi
5. Bidang Pariwisata
  - a. Seksi Pengawasan Objek Wisata
  - b. Seksi Sarana Pariwisata
  - c. Seksi Promosi Pengembangan Wisata
6. Unit Pelaksana Teknis
  - a. UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas

## Bagan Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



### Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah sebagai berikut :

#### b. Kepegawaian

Sampai akhir bulan Desember 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tercatat PNS 27 orang serta Tenaga Sukarela (TKS) berjumlah 54 orang yang terdiri dari :

Tabel:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	0
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tingkat I	III/d	6
5.	Penata	III/c	5



6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tk. I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0
	<b>Jumlah.....</b>		<b>27</b>

## 5. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2016-2021, berpedoman pada Peraturan Walikota

Dumai Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

##### **2.1.1. Visi Pembangunan Kota Dumai**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh

pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ”***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai

"Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

### **3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Mengacu kepada Visi Provinsi Riau dan bertolak pada kondisi maka ditetapkan visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 – 2026 adalah :

***“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.***

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- a. Masyarakat Dumai Yang Makmur, keadaan masyarakat Kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.

Arti kata :

- 1) Layak ; wajar pantas ; patut ; mulia ; terhormat
- 2) Lahir ; keduniaan ; jasmani
- 3) Bathin ; sesuatu yang terdapat di dalam hati ; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

- b. Masyarakat Dumai yang madani ; Keadaan masyarakat Kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.

Arti Kata :

1. Nilai ; Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
  2. Norma ; Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima ; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu ;
  3. Hukum ; Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
  4. Berperadaban ; Yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin ; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa;
- c. Tahun 2026 ; Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021 – 2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan.

#### **Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026**

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Meningkatkan pelayanan air minum yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan.
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.
8. Mewujudkan Dumai sebagai one stop city yang berbasis potensi daerah.

Dari Kedelapan misi tersebut yang berkaitan dengan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah misi **Kesatu** dan **Kedua**

**Misi Kesatu** Yaitu :

***“ Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri “***

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang prduktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional.

**Misi Kedua** Yaitu :

***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu”***

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek Pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang

inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan profesional sesuai pemantapan aspek Pendidikan umum, Kesehatan, kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan Pendidikan keagamaan.

Dengan tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Kota Dumai sebagai Destinasi Wisata

Dan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

Meningkatkan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan wisata.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.



## 3.2 Telaahan Renstra K/L

### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu pengembangan :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Ekonomi kreatif mulai mendapat perhatian khusus dalam pembangunan di Indonesia, setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 Tentang

Pengembangan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Inpres tersebut kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 – 2015, berupa pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Visi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia hingga tahun 2025 adalah :

***Bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia.***

Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 8 misi, yaitu :

1. Peningkatan kontribusi kreatif terhadap PDB Indonesia ;
2. Peningkatan ekspor nasional dan produk / jasa berbasis kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan semangat kontemporer ;
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif ;
4. Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di Industri kreatif ;
5. Pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi dan generasi yang akan datang ;
6. Penciptaan nilai ekonomi dari inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara ;
7. Penumbuh – kembangan kawasan – kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensi ; dan
8. Penguatan citra kreatif pada produk / jasa sebagai upaya pencitraan negara (national branding) Indonesia di mata dunia internasional.

Adapun pengembangan hingga tahun 2025 difokuskan pada upaya mengutamakan kreativitas pada semua sektor pembangunan dan pada 15 kelompok industri kreatif, yaitu (1) Penerbitan dan Pencetakan, (2)

Periklanan, (3) TV dan Radio, (4) Musik, (5) Seni Pertunjukan, (6) Film, Video dan Fotografi, (7) Kuliner, (8) Seni Rupa, (9) Arsitektur, (10) Desain, (11) Fashion, (12) Kerajinan, (13) Teknologi Informasi, (14) Permainan Interaktif, serta (15) Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025, Pemerintah Pusat menetapkan adanya 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Yang dimaksud dengan DPN adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang dimaksud KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasaran menetapkan 9 Destinasi wisata syariah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Riau. Penetapan suatu daerah menjadi tujuan wisata syariah dilakukan berdasarkan hasil kajian kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan fasilitas pendukung yang memenuhi standar syariah islam. Bukan hanya dilihat dari ketersediaan daya tarik wisata religi atau tempat wisata ziarah saja, tetapi ketersediaan fasilitas

pendukung, seperti hotel, restoran, spa maupun fasilitas lainnya yang memenuhi standar syariah islam.

Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian yang menangani bidang pariwisata, dibawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman diminta untuk bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM untuk menciptakan kedaulatan maritim, yang termasuk agenda pertama dari NAWA CITA, 9 Agenda Prioritas. Dimana ekowisata bahari dan ekowisata sungai merupakan jenis wisata yang akan mendapat prioritas dalam pembangunan.

Didalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan 2 sasaran pembangunan pariwisata yaitu sasaran pertumbuhan dan sasaran pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan meliputi (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional meningkat dari 4,2 % pada tahun 2014 menjadi 8 % pada tahun 2019 ; (2) Jumlah wisatawan mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang pada tahun 2019 ; (3) Jumlah wisatawan nusantara dari 250 juta kunjungan pada tahun 2014 menjadi 275 juta kunjungan pada tahun 2019 ; dan (4) Peningkatan devisa dari 120 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 240 triliun rupiah pada tahun 2019.

Adapun sasaran pembangunan inklusif adalah meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014 – 2019, telah disusun arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, sebagai berikut :

(1) Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke wisatawan mancanegara mencakup :

- (a) Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi dan wisata petualangan ;
  - (b) Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja ;
  - (c) Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE dan event, wisata olahraga dan wisata kawasan terpadu ;
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata
- (a) Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata ;
  - (b) Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata ;
  - (c) Meningkatkan citra kepariwisataan ;
  - (d) Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management organization (DMO).
- (3) Pembangunan Industri Pariwisata
- (a) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal ;
  - (b) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata ;
  - (c) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jejaring ketrampilan tenaga kerja lokal dibidang pariwisata ;
  - (d) Mendorong terbangunnya sikap / mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.
- (4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
- (a) Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan ;

- (b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata ; serta
- (c) Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

**Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan Prestasi Daerah dalam Bidang Olahraga	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55	60	65	70	75
			Persentase Wirausaha Muda	70	75	80	85	90
			Cakupan pembinaan Olahraga	25	25	27	28	29
			Jumlah Prestasi Olahraga	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	48%	49%	50%	51%	52%
				39.325	39.718	40.112	40.505	40.898
				3.834	3.872	3.911	3.949	3.987
			Lama Kunjungan Wisata	2	2	3	3	4
			PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.086.180.625	15.237.047.431	15.389.412.856	15.543.306.984

### **2.1.3. Strategis, arah kebijakan, Program dan Indikator kinerja.**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

### **2.1.4. Strategi**

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian
2. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten
3. Meningkatkan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan wisata

### **2.1.5. Arah Kebijakan**

1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
2. Peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
3. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
4. Pembangunan GOR
5. Revitalisasi sarana olahraga
6. Peningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan
7. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan tujuan wisata
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan

### 2.1.6. Program untuk pencapaian sasaran.

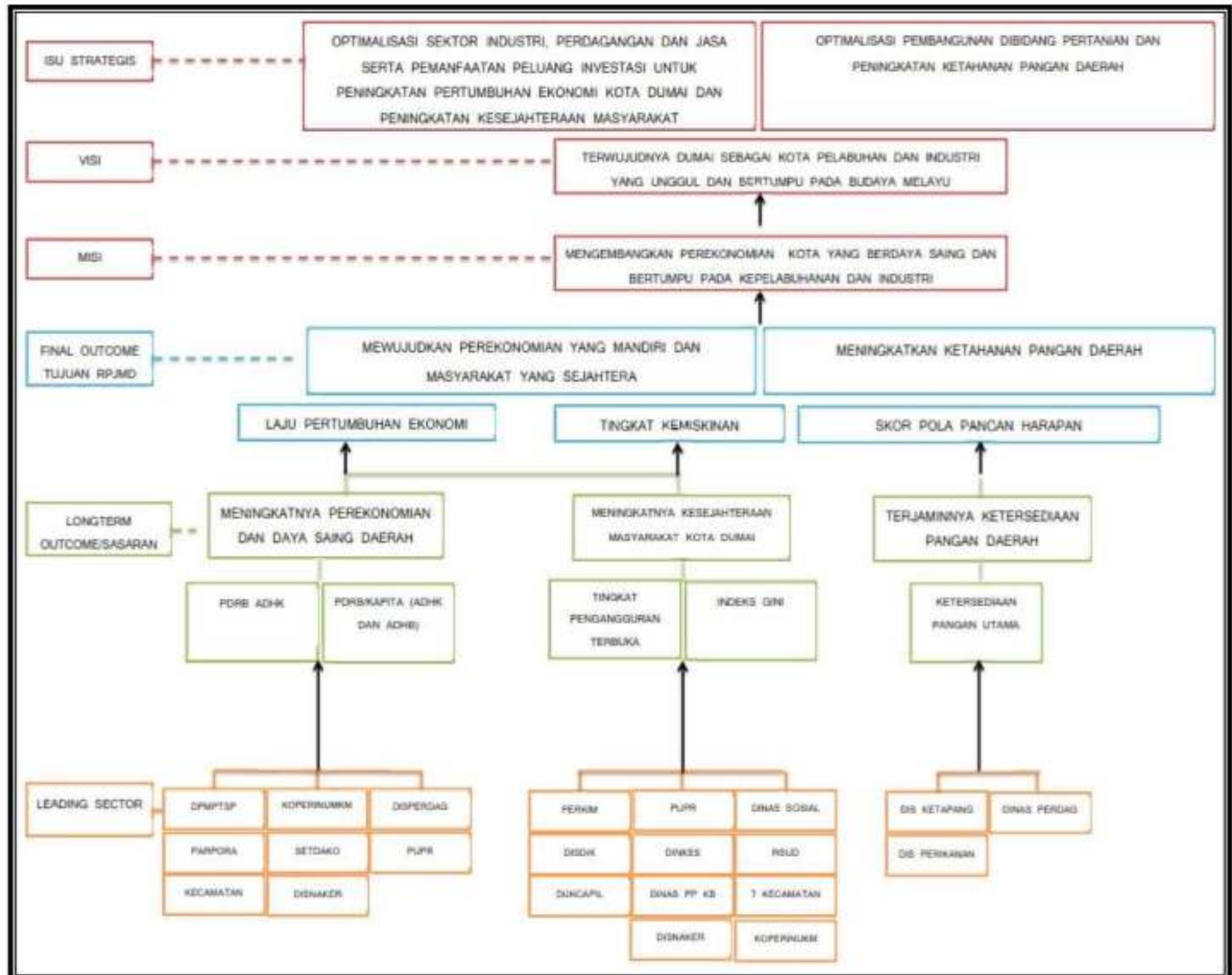
Berdasarkan visi, misi tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan Jumlah wisatawan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata PDRB	Mengembangkan Ekonomi Kreatif
Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu		
Membangun masyarakat damai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatkan potensi pemuda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan berjenjang



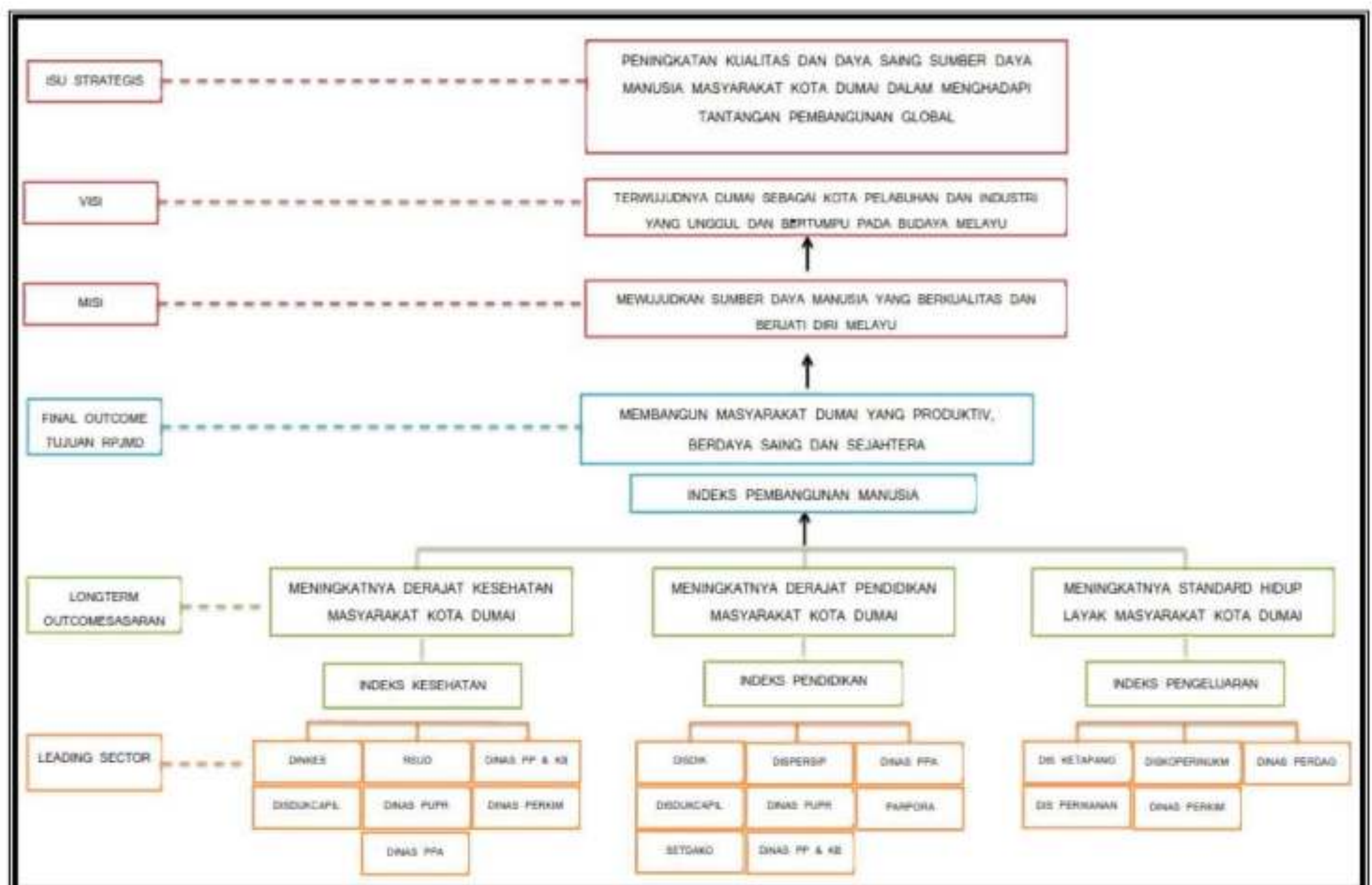
Selanjutnya Untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1



Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2





			3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 59.099.200,-
			3.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Rp. 61.883.940,-
			4.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Rp. 7.992.000,-
			5.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 193.364.071
			<b>-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.406.538.529,-</b>
			1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.179.000,-
			2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 182.089.600,-
			3.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.224.468,-
			4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 1.185.045.461,-
			<b>-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 131.820.400,-</b>
			1.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 31.140.400
			2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Rp. 100.580.000,-
			<b>-Penataan Organisasi</b>	<b>Rp. 13.457.300,-</b>
			1.Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp. 13.457.300,-

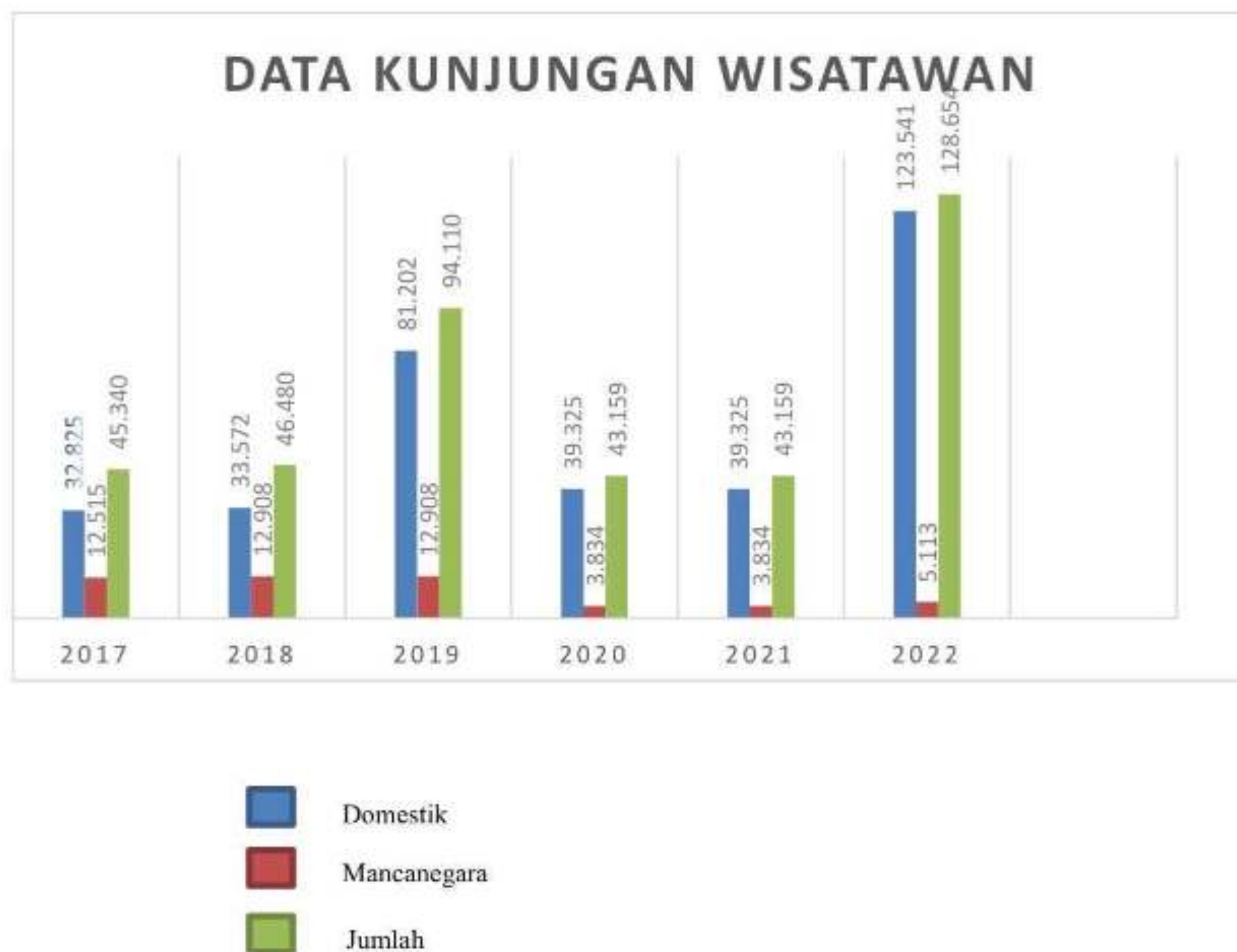
				Kinerja Pemerintah Daerah	
<b>II.</b>	<b>Kepemudaan</b>				
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	55 %	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :</b>  <b>-Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota</b> 1.Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera  <b>- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</b> 1.Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	<u><b>Rp. 920.485.987,-</b></u>  <b>Rp. 770.485.987,-</b>  Rp. 770.485.987,-  <b>Rp. 150.000.000,-</b>  Rp. 150.000.000,-
<b>III.</b>	<b>Olahraga</b>				
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.	-.Prestasi Olahraga ditingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA) -. Jumlah klub olahraga -. Jumlah lapangan -.Jumlah Pembinaan cabang olahraga	5  82  2  28	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :</b>  <b>- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b> 1.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dari Dunia Usaha	<u><b>Rp. 1.588.199.952,-</b></u>  Rp. 1.077.097.182,-  Rp. 1.077.097.182,-

				<p><b>- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota</b></p> <p>1. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan</p> <p><b>- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b></p> <p>1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</p>	<p><b>Rp. 262.488.815</b></p> <p>Rp. 262.488.815,-</p> <p><b>Rp. 248.615.955,-</b></p> <p>Rp. 248.615.955,-</p>
<b>IV.</b>	<b>Pariwisata</b>				
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	<p>Kunjungan wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domestik</li> <li>- Mancanegara</li> </ul>	<p>39.263</p> <p>12.757</p>	<p><b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b></p> <p><b>- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</b></p> <p>1. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p><b>- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota</b></p> <p>1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota</p> <p><b>Program Pemasaran Pariwisata</b></p> <p><b>-Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</b></p> <p>1. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</p> <p><b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b></p> <p><b>-Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b></p>	<p><b><u>Rp. 8.637.203.981</u></b></p> <p><b>Rp. 8.185.000.000,-</b></p> <p>Rp. 8.185.000.000,-</p> <p><b>Rp. 452.203.981,-</b></p> <p>Rp. 452.203.981,-</p> <p><b><u>Rp. 40.000.000,-</u></b></p> <p><b>Rp. 40.000.000,-</b></p> <p>Rp. 40.000.000,-</p> <p><b><u>Rp. 270.881.200,-</u></b></p> <p><b>Rp. 270.881.200,-</b></p>

			<b>Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b> 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 0,-  Rp. 270.881.200,-  Rp. 0,-
Jumlah.....				<b>Rp. 17.218.749.159,-</b>

Pencapaian kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sampai dengan 2022 dan target 2022 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik berikut ini :

Grafik  
Pencapaian kunjungan wisatawan di Kota Dumai



**Tabel. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas  
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Target	Realisasi	Anggaran %
<b>I.</b>	<b>Pemuda</b>					
1.	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Presentase Wirausaha Muda	Rp. 920.485.987,-	3 kegiatan	Rp. 914.865.791,-	99.39%
<b>II.</b>	<b>Olahraga</b>					
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Rp. 1.077.097.182	3 kegiatan	Rp. 1.077.097.182,-	100%
		Jumlah Prestasi Olahraga	Rp. 511.027.770		Rp. 487.782.246	95.45 %
<b>III.</b>	<b>Pariwisata</b>					
	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata	Rp. 8.637.203.981	43.159	Rp6.448.847.026,-	74.66%



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

**A. Analisa Capaian Pengukuran Kinerja**

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan.

Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya outcome dan output pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2022;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan. Capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel : Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta target dan Realisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan Prestasi Daerah dalam Bidang Olahraga	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55	60	65	70	75
			Persentase Wirausaha Muda	70	75	80	85	90
			Cakupan pembinaan Olahraga	25	25	27	28	29
			Jumlah Prestasi Olahraga	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	48%	49%	50%	51%	52%
				39.325	39.718	40.112	40.505	40.898
				3.834	3.872	3.911	3.949	3.987
			Lama Kunjungan Wisata	2	2	3	3	4

			PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.086.180.625	15.237.047.431	15.389.412.856	15.543.306.984
--	--	--	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Anggaran

Dari hasil laporan monitoring dan evaluasi triwulan pertama tahun 2022 terhadap program rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 14.659.258.416,- Dari jumlah anggaran Rp. 17.218.749.159,- atau 85.14% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi sebagai berikut :

Anggaran belanja langsung pada APBD tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah sebesar Rp. 17.218.749.159,- yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 5.762.178.039,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 5.420.037.621,-** atau sebesar 94,06% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 3.740.800,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 3.740.800,-** dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 3.641.495.060,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 3.366.416.884,-** dan atau sebesar 92.54% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi fisik 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 2.916.900,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.916.900,-** dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen keuangan akhir tahun dengan realisasi fisik 100%

### 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

#### - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.540.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.540.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah Aset SKPD dengan realisasi fisik 100%

### 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 105.108.689,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 105.096.200,- dan atau sebesar 99.99% . Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan Alat-alat Listrik pada SKPD dengan realisasi fisik 100 %

#### - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 103.362.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.084.100,- dan atau sebesar 99.73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 100%

#### - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 59.059.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.870.800,- dan atau sebesar 99.68% adapun indikator kinerja keluaran adalah

tersedianya jumlah bahan logistik kantor dengan realisasi fisik 100%

- Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.683.940,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.103.300,- dan atau sebesar 99.06% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah cetak dan penggandaan berkas dan dokumen SKPD dengan realisasi Fisik 100%

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.992.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.980.000,- dan atau sebesar 99.85% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan dengan realisasi fisik 100 %

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 193.364.071,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 193.361.251,- dan atau sebesar 99.79% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan target 1 tahun dengan realisasi fisik 100%

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.179.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.167.000,- dan atau sebesar 99.88% adapun indikator kinerja keluaran adalah

jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 182.089.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 134.901.182,- dan atau sebesar 74.09% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.224.468,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.973.668,- dan atau sebesar 92.30% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun dengan realisasi fisik 100%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.185.045.461,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.169.682.436,- dan atau sebesar 98.70% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.680.000,- dan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.207.500,- dan atau sebesar 99.53% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.140.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.440.000,- dan atau sebesar 97.75% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

7. Penataan Organisasi

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.467.300,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.467.300,- dan atau sebesar 100 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan kinerja pemerintah daerah dengan realisasi fisik 100%

I. Bidang Kepemudaan

***Sasaran Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu)

Program,yaitu:

1. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota



a. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 770.485.987,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 764.865.791,- dan atau sebesar 99.27% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 120 orang dengan realisasi fisik 100%

- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%

## II. Bidang Olahraga

### ***Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.077.097.182,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.077.097.182,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%

- **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

a. **Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 262.486.815,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 260.802.446,- dan atau sebesar 99.36% dengan realisasi fisik 100%

- **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

a. **Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 248.615.955,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 248.602.950,- dan atau sebesar 99.99% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah orang yang mengikuti senam setiap hari Kamis dengan realisasi fisik 100%

**III. Bidang Pariwisata**

***Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 3 (tiga) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan :

- **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota**
  - a. **Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/ Kota.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.185.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.001.116.235.79,- dan atau sebesar 73.32% Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.185.000.000 (delapan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.001.116.235,79 (enam milyar satu juta seratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah ) atau 73.32 % (Terdapat penambahan Dana DID tahun berjalan periode 2022 Berdasarkan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja Tahun berjalan Periode tahun 2022 dan PMK Nomor 171/PMK.07/2022 tentang pengelolaan insentif Fiskal),- Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman Bukit Gelanggang dengan tingkat pencapaian adalah 96.67%.

- **Pengelolaan Destnasi Pariwisata Kab/ Kota**
  - a. **Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 452.203.981 (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 177.102.240 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- atau 39.16 % dari anggaran (terdapat pengadaan barang yang batal dilaksanakan terkait dengan kondisi dan karantina barang). Adapun indikator kinerja keluaran jumlah terbangunnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Kota Dumai dan dengan tingkat pencapaian adalah 95%.

## 2. Program Pemasaran Pariwisata

- **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota**
  - a. **Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 100% dan atau Realisasi Fisik sebesar 100%.

## 3. Program Pengembangan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau rrealisasi keuangan sebesar 0% dan atau realisasi Fisik sebesar 0%.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 270.681.200,- (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupia) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 270.628.550,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) realisasi keuangan sebesar atau 99.82% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi Kreatif tingkat dasar (pelaksanaan festival mancing dan Festival lagu Batak oleh 800 orang peserta, dengan tingkat pencapaian realisasi fisik adalah 94.44%.

c. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- dan atau sebesar 0% dengan realisasi fisik 0%

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.

Tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan realisasi kinerja IKU sampai dengan tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut :

**TABEL CAPAIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**  
**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target sampai dengan				Target Tahunan 2022	Realisasi sampai dengan				Realisasi Tahunan 2022
				TW 1	TW2	TW3	TW4		TW 1	TW2	TW3	TW4	
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)						
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	55	0	0	0	55	95	0	0	0	95
		Presentase Wirausaha Muda	Persentase	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	25				25	25				25
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	0	2	0	0	2	0	4	0	0	4
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	%										
		Domestik		20.500	-	-	18.825	39.325	50.000	-	-	73.541	123.541
		Mancanegara		1.500	-	-	2.334	3.834	5.300	-	-	14.012	19.312
		Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		PAD Sektor Pariwisata	Rp.	-	-	-	-	-	200.000.000	-	49.000.000	20.000.000	269.000.000

D. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.

Tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan realisasi kinerja IKU sampai dengan tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan 2022	Realisasi Tahunan 2021	Realisasi Tahunan 2022	%
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	55	62	62	113%
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase	70	0	0	0%
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	25	28	28	112%
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	2	0	4	200%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	%	48%	73%	298,06%	621%
		Domestik		39.325	46.258	123.541	314%
		Mancanegara		3.834	5.040	19.312	504%
		Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2	3	150%
		PAD Sektor Pariwisata	Rp.	-	180.000.000	269.000.000	



E. Penghargaan yang diterima Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Prestasi yang diraih Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

1. Prestasi yang diraih Dalam Pengembangan Kota Dumai Layak Anak Tahun 2022



2. Peringkat ke IV dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Riau Tahun 2022

**KLASEMEN AKHIR PEROLEHAN MEDALI  
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) XV RIAU TAHUN 2022**  
Tanggal: 25 Juni 2022 Waktu: 17:00 WIB

NO	KABUPATEN / KOTA	EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PEKANBARU	19	7	4
2	ROKAN HILIR	4	1	3
3	SI AK	3	6	9
4	DUMAI	3	3	6
5	BENGKALIS	2	4	13
6	KAMPAR	2	4	4
7	INDRAGIRI HULU	2	3	6
8	PELALAWAN	1	1	8
9	ROKAN HULU	1	1	4
10	KUANTAN SINGINGI	-	6	9
11	INDRAGIRI HILIR	-	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>67</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

### **PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

Memperhatikan beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai di Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :

Permasalahan Urusan Kepemudaan :

1. Prasarana Kepemudaan atau Gedung yang telah usang.
2. Rendahnya Motivasi SDM Aparatur dalam pembinaan terhadap pemuda
3. Rendahnya Pemahaman Pemuda dalam berwirausaha
4. Kurangnya Pemahaman OKP dalam berorganisasi.
5. Kurangnya Pelatihan dalam Pembinaan Manajemen OKP.

Permasalahan Urusan Olahraga :

1. Rendahnya Pembinaan olahraga bagi pelatih dan atlet secara terus menerus.
2. Sarana dan Prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah masih sedikit.

#### Permasalahan Urusan Kepariwisata :

1. Kurangnya Pembinaan masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
2. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembangunan infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata.
3. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan.
4. Belum maksimalnya pembinaan/pengelolaan objek wisata kota Dumai.
5. Belum adanya regulasi dan sistem tata kelola destinasi pariwisata kota Dumai.

Adapun upaya-upaya pemecahan masalah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai saran/rekomendasi yang perlu dijadikan acuan agar dapat mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### Pemecahan Masalah Urusan Kepemudaan :

1. Segera dilaksanakan rehap sarana dan prasana kepemudaan berupa gedung yang telah usang yang tidak layak pakai.
2. Mengirim Aparatur untuk melaksanakan bimbingan Teknis tentang bagaimana pembinaan terhadap pemuda.
3. Segera dilaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri.
4. Peningkatan Pemahaman OKP dalam berorganisasi melalui Pelatihan manajemen OKP.

#### Pemecahan Masalah Urusan Olahraga :

1. Perlunya penganggaran yang lebih dalam pembinaan olahraga dan atlit secara terus menerus.
2. Dilaksanakn penambahan penambahan sarana dan prasaran olahraga yang dimiliki pemerintah.

## Pemecahan Masalah Urusan Pariwisata :

1. Segera ditindaklanjuti dengan pelatihan SDM Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, daya tarik maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing yang kuat;
3. Menanamkan jiwa bisnis kepariwisataan terhadap seluruh elemen masyarakat;
4. Menyamakan persepsi dari seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam setiap kegiatan dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan;
5. Dilaksanakan pendekatan dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung percepatan pengembangan destinasi pariwisata kota dumai.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.



R. DONA FITRI NLLAHI, SKM, M.Si  
Dumai  
Nip. 197310311992122001